



LAPORAN KINERJA BBRSEKP

TW II 2026



Kementerian Kelautan Dan Perikanan
Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kelautan Dan Perikanan
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
2026



LAPORAN KINERJA BBRSEKP

TW II 2026



Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kelautan Dan Perikanan

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan

2026



Tim Penyusun

Pembina

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan
(Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si)

Penanggung Jawab

Ketua Tim Kerja Program, Anggaran dan Monitoring Evaluasi
(Fenni Eddrisea, M.Si)

Anggota

Nurma Yunita D
Edwin Yulia Setyawan
Retno Erlina Rahmawati
Dedi Prayitno
Rizky Hendriansyah

Kontributor

Sub Bagian Umum
Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Pengembangan SDM Aparatur
Ketua Tim Kerja Pengelolaan Keuangan
Ketua Tim Kerja Kehumasan, Data dan Informasi
Ketua Tim Kerja Analisis Sosial Ekonomi

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmat-NYA sehingga Laporan Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) triwulan II tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab atas kinerja dan pencapaian visi dan misi BBRSEKP selama periode triwulan II tahun 2026, dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

BBRSEKP pada tahun 2026 mempunyai beberapa fungsi antara lain memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian selama periode triwulan I tahun 2026 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi BBRSEKP dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja. Kinerja BBRSEKP diukur atas dasar penilaian indikator Kinerja (IK) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan (SK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP tahun 2026 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Selanjutnya, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara utuh atas capaian kinerja pelaksanaan tugas serta bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai BBRSEKP dalam meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas kontribusi semua pihak yang mendukung pencapaian kinerja BBRSEKP selama triwulan II tahun 2026. Semoga laporan kinerja ini juga memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Jakarta, 20 Juli 2026

Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan



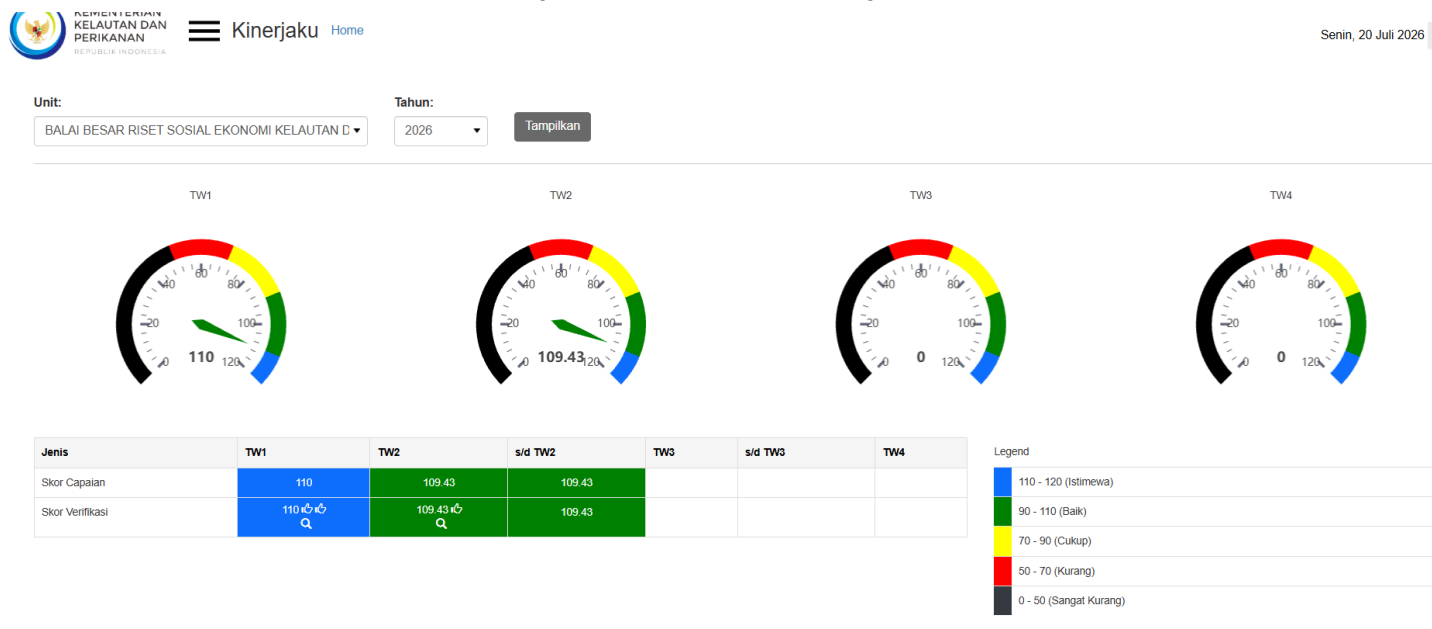
Dr. Novi Susetyo Adi, S.T, M.Si

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan gambaran capaian kinerja BBRSEKP sepanjang triwulan I tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi informasi atas kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi utama, mengelola keuangan, dan implementasikan SAKIP di lingkungan BBRSEKP pada tahun 2026.

Pada tahun 2026, BBRSEKP telah menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) yang akan dicapai pada akhir tahun dengan dukungan anggaran Rp8.280.208.000 guna mencapai target - target yang telah ditetapkan pada 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 9 (sembilan) Indikator Kinerja (IK). Hasil pengukuran kinerja dari aplikasi kinerjaku.kkp.go.id diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP pada TW II tahun 2026 sebesar **109,43 %** sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 1. Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP TW II Tahun 2026



Selama triwulan II tahun 2026 dari 9 IK BBRSEKP, terdapat 1 IK berstatus istimewa (biru) dan 3 IK berstatus baik (hijau) serta 5 IK baru akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi 4IK tersebut adalah:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 86% dan capaian sebesar 86% atau sama dengan 100%;

2. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) dengan target 80 dan capaian sebesar 87,58 atau sama dengan nilai indeks IP ASN sebesar 109,48%;
3. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 92,10 dan capaian senilai 99,67 atau sama dengan 108,22%
4. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 77% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah Baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja pada triwulan II tahun 2026, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2025 sebesar Rp4.499.905.784,- relatif rendah dari pagu anggaran Rp8.280.208.000. Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 54,35% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **“BAIK”**, yaitu dari SK “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan” dengan persentase capaian 109,43%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Dalam rangka mendorong peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBRSEKP secara berkala perlu dilakukan melalui penguatan pengendalian kinerja dan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi pada triwulan berikutnya.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP

berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.

Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan II Tahun. 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Capaian TW II Tahun 2026	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86	86	100%
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80	87,58	109,48
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,10	99,67	108,22
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		7 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77	100	120%
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

DAFTAR ISI

Tim Penyusun	iii
Kata Pengantar	iv
Ringkasan Eksekutif	v
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xii

Bab I Pendahuluan **1**

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	3
1.3. Tugas dan Fungsi	5
1.4. Keragaan SDM	5
1.5. Potensi dan Permasalahan	6
1.6. Sistematika Laporan	8

Bab II Perencanaan Kinerja **10**

2.1 Rancangan Indikator dan Target Kinerja	10
2.2 Rencana Kerja Tahunan	14
2.3 Perjanjian Kinerja	15
2.4 Pengukuran Kinerja	17

Bab III Akuntabilitas Kinerja **18**

3.1. Capaian Kinerja BBRSEKP TW II Tahun 2026	18
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	19
3.3. Realisasi Keuangan	37
3.4. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP	39

Bab IV Penutup **41**

4.1 Kesimpulan	41
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	42

Lampiran

- Perjanjian Kinerja
- Penghargaan BBRSEKP

Daftar Tabel

1	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP TW II Tahun. 2026	Viii
2	Rencana Kerja BBRSEKP TW II Tahun 2026	14
3	Perjanjian Kerja BBRSEKP TW II Tahun 2026	15
4	Capaian Kerja BBRSEKP TW II Tahun 2026	19
5	Capaian IK Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	20
6	Perbandingan Capaian IK 2 dengan K/L Sejenis di BPPSDMKP	23
7	Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN	24
8	Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN	24
9	Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN	25
10	Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN	25
11	Capaian IK Indeks profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	25
12	Perbandingan Capaian IK 3 dengan K/L Poltekkes Kemenkes	25
13	Capain IK 5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	29
14	Perbandingan Capaian IK 5 dengan K/L Sejenis di BPPSDMKP	30
15	Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	35
16	Perbandingan Capaian IK 8 dengan K/L Sejenis di BPPSDMKP	35
17	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja TW II Tahun 2026	38
18	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran TW II Tahun 2026	38
19	Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK TW II Tahun 2026	38
20	Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan II Tahun. 2026	42

Daftar Gambar

1	Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerja BBRSEKP TW II Tahun 2026	V
2	Struktur Organisasi BBRSEKP	4
3	Rincian ASN BBRSEKP	5
4	Komposisi Pegawai BBRSEKP	5
5	Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Renstra BBRSEKP 2025-2029	13
6	Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2026	13
7	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1	23
8	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2	27
9	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3	29
10	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4	32
11	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5	34
12	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6	37
13	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7	39
14	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8	41
15	Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 9	43
16	Capaian Kinerja pada <i>Dashboard</i> Kinerja BBRSEKP Tahun 2026	48





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Tugas Dan Fungsi

1.4 Keragaan SDM

1.5 Potensi Dan Permasalahan

1.6 Sistematika Laporan Kinerja

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) merupakan salah satu unit kerja eselon II pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Badan Penyuluhan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDM KP). BBRSEKP menurut PERMEN KP No.72/PERMEN-KP/2020, menjadi unit kerja yang memiliki tugas dalam melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan. Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab kepada lingkup Eselon I yaitu BPPSDM KP, maka BBRSEKP memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan hal diatas, maka kewajiban tersebut dilaksanakan dengan dasar Peraturan Presiden Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada peraturan disebutkan bahwa setiap unit kerja diwajibkan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi, dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada setiap akhir tahun kepada Menteri K/L melalui Sekretariat Jenderal pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

Bentuk implementasi tugas dan fungsi BBRSEKP melalui pelaksanaan kegiatan penelitian dan didukung operasional kegiatan manajerial serta sarana dan prasarana. Ketiga Kegiatan tersebut menjadi komponen rencana kegiatan satker yang memiliki target output atau keluaran pada setiap tahunnya. Output yang dihasilkan merupakan indikator keberhasilan dari BBRSEKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan perencanaan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Sebagai salah satu instansi dan penyelenggara negara di lingkup Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), BBRSEKP telah menetapkan rencana kerja tahun 2025, melakukan monitoring dan evaluasi, pengukuran kinerja yang telah dicapai, serta penyusunan LKj BBRSEKP Tahun 2025 sebagai wujud akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang diemban BBRSEKP.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Kerja TA. 2025, berupa output dukungan manajemen satker. Target output tertuang dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) BBRSEKP dan secara detail tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) BBRSEKP dengan alokasi anggaran Rp8.280.280.000 dengan DIPA Petikan Satker Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP (403836) Nomor : SP DIPA - 032.12.2.403836/2026 tanggal 10 Juli 2026 dengan kode digital stamp DS:DS:2010-1718-6703-7092 (Revisi 05).

Gambaran akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada TW II Tahun 2026 serta keluaran atau output apa saja yang telah dihasilkan BBRSEKP dituangkan dalam laporan kinerja ini. Meskipun laporan kinerja TW II tahun 2026 lebih banyak menginformasikan kegiatan manajerial, berkenaan dengan masih belum ditetapkannya organisasi baru pasca tugas riset yang disatukan kedalam BRIN, namun tetap disusun sesuai kaidah aturan yang berlaku untuk dapat diketahui dan menjadi informasi bagi stakeholder terkait dan masyarakat luas.

Adapun dasar hukum penyusunan LKJ BBRSEKP tahun 2026 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 205 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain.
2. Sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.
3. Sebagai umpan balik (*Feed back*) untuk perbaikan kinerja triwulan di tahun berikut

1.3 Tugas Dan Fungsi

Sesuai Peraturan Menteri KP Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (BBRSEKP) yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan memiliki tugas ***melaksanakan penelitian di bidang sosial ekonomi, budaya dan kelembagaan, sistem usaha, pemasaran dan perdagangan, analisis, dan pengembangan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan.***

Dalam melaksanakan tugasnya, BBRSEKP menyelenggarakan fungsi yang meliputi :

1. Penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
2. Perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan riset dibidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumber daya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, serta politik dan hukum kelautan dan perikanan;
4. Pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
5. Pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Tugas dan fungsi yang diemban tersebut merupakan salah satu indikator perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Sebagai unit kerja di lingkungan BPPSDMKP, memiliki peran strategis dalam mendukung perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis riset di bidang kelautan dan perikanan. BBRSEKP berfungsi sebagai penyedia rekomendasi kebijakan (policy recommendation) yang berbasis bukti ilmiah (evidence-based policy) melalui pelaksanaan riset sosial ekonomi yang komprehensif, integratif, dan aplikatif.

Dalam mendukung BPPSDM, BBRSEKP berkontribusi pada penguatan kualitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan melalui penyediaan hasil kajian dan analisis yang menjadi dasar pengembangan program pendidikan, pelatihan, serta penyuluhan yang adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan.

Terhadap KKP secara lebih luas, BBRSEKP berperan dalam:

1. Mendukung penguatan struktur ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui analisis daya saing, tata niaga, investasi, dan kebijakan ekonomi sektor.
2. Mendorong terwujudnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan melalui kajian sosial ekonomi terkait kesejahteraan masyarakat pesisir, tata kelola sumber daya, dan instrumen kebijakan berbasis keberlanjutan.
3. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan melalui penyusunan analisis dampak kebijakan, evaluasi program, serta rekomendasi strategis dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Adapun dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Kepala BBRSEKP dibantu oleh Sub Bagian Umum dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

A. Sub Bagian Umum

Sub bagian umum mempunyai tugas melakukan penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, persuratan, kearsipan, rumah tangga, pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan, serta pengelolaan prasarana dan sarana riset.

B. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

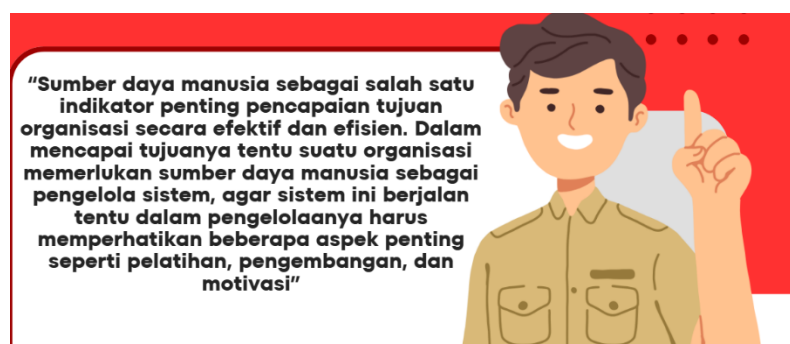
Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Jabatan Fungsional menjalankan fungsi mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Adapun struktur organisasi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Nomor 72/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, seperti terlihat pada gambar 1.



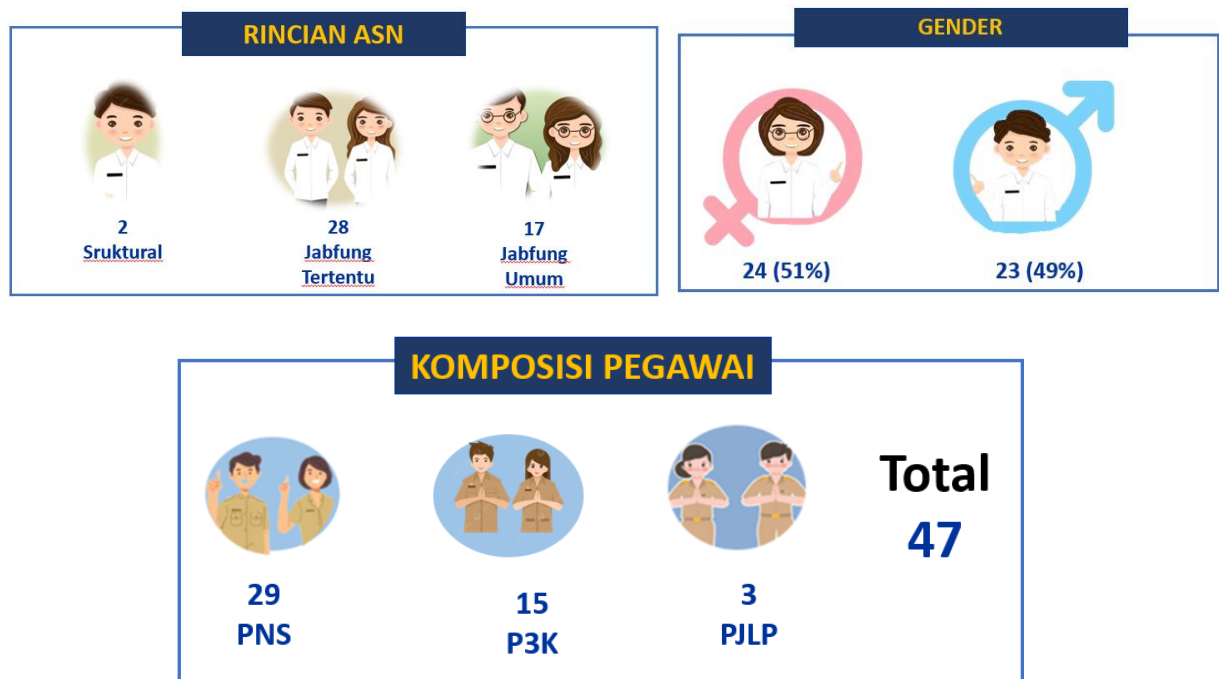
Gambar 2 . Struktur Organisasi BBRSEKP

1.4 Keragaan SDM



Sumber Daya Manusia (SDM) Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan sampai dengan tahun 2025 berjumlah 49 orang, terbagi dalam 3 (tiga) yaitu SDM Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, Jabatan Fungsional Umum, P3K, serta Tenaga PJLP. Pada tahun 2025, kualitas SDM pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan diharapkan mampu mengembangkan, memperbaiki, dan memperkenalkan berbagai program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi

Kelautan dan Perikanan. Komposisi dari pegawai yang berada di BBRSEKP, sebagai, berikut :



Gambar 3 . Rincian ASN BBRSEKP

1.5 Potensi Dan Permasalahan

1) Potensi

Potensi BBRSEKP yang dapat dikembangkan untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan melalui Kelembagaan Riset.

Kelembagaan BBRSEKP dibentuk untuk mendukung capaian agenda pembangunan nasional, pengarusutamaan pembangunan KKP, dan arah riset BPPSDM KP. Sebagai bagian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, BBRSEKP memiliki struktur organisasi dalam rangka mewujudkan efektifitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. BBRSEKP mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan. Adapun BBRSEKP menyelenggarakan fungsi:

- perumusan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan riset di bidang ekonomi makro, inventarisasi dan tata kelola sosial ekonomi sumberdaya, sistem usaha dan pemasaran produk, inkubasi bisnis dan alih teknologi, sosial budaya masyarakat, komunikasi, politik dan hukum kelautan dan perikanan;

- c. pelaksanaan tata laksana, sarana, dan pelayanan jasa riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan;
- d. pengelolaan data, informasi, dan publikasi hasil, dan monitoring dan evaluasi riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan ini dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional mengalami perubahan yang cukup signifikan. Dampaknya pada tahun 2022 sampai dengan akhir tahun 2025 adalah program dan kegiatan terkait riset sudah tidak dapat dilaksanakan.

Program riset pada BBRSEKP bertransformasi menjadi kegiatan Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang ditanggungjawab oleh Tim Kerja Analisis Kebijakan Sosial Ekonomi (Ansos), yang mana hal ini merupakan eksis dari perubahan organisasi yang sangat dinamis. Kegiatan yang dilakukan secara fungsi masih berupa kegiatan yang mendukung program kegiatan di lingkup eselon I kementerian, merupakan kegiatan menganalisa suatu topik atau rencana program dan memberikan rekomendasinya. Tim kerja ini melakukan kegiatan yang mendukung seluruh program BPPSDMKP dan program prioritas KKP.

Dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif dan berkualitas tentunya perlu didukung adanya SDM yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur dan memiliki kompetensi di bidangnya. Pengembangan SDM yang berbasis kompetensi merupakan suatu keharusan agar organisasi dapat mewujudkan suatu kinerja yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten khususnya dapat dilakukan melalui pembinaan karir dengan perpaduan antara sistem prestasi kerja dan sistem karir.

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran tingkat profesionalitas ASN diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi (diklat, seminar, *workshop*) yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi

dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS. Dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.

Sampai dengan triwulan II tahun 2026 , meski jumlah pegawai dengan latar belakang pendidikan di bawah S1 relatif kecil, yaitu sejumlah 7 orang (14,29%) dibandingkan dengan tahun 2025 terjadi peningkatan sebesar 12,24%, yang mana peningkatan bersumber dari pengangkatan P3K pada tahun 2025, namun kontribusi pegawai dimaksud dibutuhkan untuk menjalankan fungsi BBRSEKP dalam hal pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan S3 mempunyai tren yang menurun dari tahun 2021 hingga triwulan II tahun 2026, karena adanya mutasi pegawai BBRSEKP ke Badan Riset Nasional sesuai dengan Perpres 78 Tahun 2021 maupun ke eselon I lainnya. Secara keseluruhan, jumlah pegawai BBRSEKP pada triwulan II tahun 2026 berkurang sebesar 4,1% dibandingkan pada akhir tahun 2025.

Terlepas dari kebijakan organisasi riset yang sedang dialami saat ini, BBRSEKP masih menghadapi beberapa tantangan untuk melaksanakan kegiatan organisasi kedepan, antara lain:

1. Kebutuhan anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM fungsional perencana, pranata komputer, statistisi untuk meningkatkan keahlian terkait data analisis, programmer, desain grafis, *full-stack developer*, dll;
2. Kondisi dan ketersediaan alat pengolah data yang sudah tidak up to date dan sesuai dengan kebutuhan terkini;
3. Jumlah ruangan pertemuan yang masih terbatas, kondisi saat ini ketersediaan ruang pertemuan digunakan bersama oleh beberapa satuan kerja yang masing-masing mempunyai frekuensi pertemuan yang tinggi.

2) Permasalahan

- SOTK BBRSEKP belum mengalami reorganisasi sejak terbentuknya BRIN berdasarkan Perpres BRIN Nomor No 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mentransfer semua tugas dan fungsi riset dari Kementerian / Lembaga ke BRIN sehingga kegiatan riset menjadi tidak lagi dapat dilaksanakan sejak Triwulan 3 Tahun 2022 sampai dengan saat ini selama organisasi baru belum terbentuk;
- Saat ini nomenklatur (nama) BBRSEKP juga masih menyandang nama 'riset';
- Hal ini menyebabkan tugas dan fungsi teknis BBRSEKP belum bisa dirumuskan dan dilaksanakan karena sudah tidak mempunyai tisi riset, namun belum terdefinisi dengan jelas tisi yang baru.

- Dampak lain dari hal ini adalah belum terakomodasinya peta jabatan pegawai secara optimal, karena beberapa pegawai telah melakukan uji kompetensi dalam jabfungsnya masing-masing dan juga ada pegawai yang telah selesai tugas belajar, namun ini semua belum bisa diangkat dalam jabfung barunya karena belum adanya peta jabatan yang baru. Dan peta jabatan yang baru bisa disusun jika tusi organisasinya sudah jelas.
- Di sisi lain BBRSEKP sejak masa menjadi unit litbang hingga kini terus mendapatkan tugas untuk membantu program-program prioritas di KKP yang sifatnya adalah lintas eselon 1, yang saat ini utamannya adalah Program Kampung Nelayan Merah Putih. Untuk tugas-tugas ini BBRSEK telah melaksanakan tugas-tugas tersebut secara optimal.
- Saat ini terdapat inisiasi untuk reorganisasi dimana BBRSEKP tidak lagi menjadi bagian dari BPPSDM, karena terdapat kesulitan secara regulasi SOTK BPPSDM yang berfokus pada penyuluhan dan pengembangan SDM. Inisiasi ini masih akan difinalkan lanjut dengan pembahasan antara BPPSDM, Biro SDMO dan BBRSEKP. Ditargetkan reorganisasi ini selesai dalam kurun waktu maksimal 6 bulan sejak November 2026.

Atas permasalahan tersebut BBRSEKP merekomendasikan agar pembahasan SOTK BBRSEKP dapat segera difinalkan sehingga tusi BBRSEKP ada kejelasan dan bisa tetap membantu KKP dalam melaksanakan program-program prioritas dengan para pegawai BBRSEKP terakomodasi peta jabatannya.

1.6 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja ini bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan pada TW II tahun 2026, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja (*performance results*) tahun 2026 terhadap rencana kinerja (*performance plans*) tahun 2026. Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di tahun berikutnya. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian laporan kinerja adalah sebagai berikut:

1. Cover Laporan

2. **Kata Pengantar**, berisi pengantar laporan dan dilengkapi dengan tanggal, bulan dan tahun serta di tanda tangani oleh Kepala BBRSEKP.

3. **Ringkasan Eksekutif**, berisi ringkasan dari laporan, meliputi: uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja, dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja .

4. **Bab I Pendahuluan**, berisi gambaran umum tentang organisasi, seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, keragaan pegawai dan organisasi serta potensi dan permasalahan.

5. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi uraian singkat tentang Rencana Strategis, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan Kinerja Tahun Berjalan, serta Pengukuran Kinerja.

6. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Berisi capaian kinerja dari indikator- indikator kinerja telag ditetapkan. Untuk setiap pernyataan kinerja dari sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang meliputi:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun lalu (dua tahun terakhir);
- c. Membandingkan realisasi kinerja tahun berjalan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- d. Membandingkan realiasi kinerja tahun berjalan dengan standar nasional jika ada;
- e. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan;
- f. Menganalisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan dan pencapaian target kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

7. **Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

8. **Lampiran**

- a. Perjanjian Kinerja; dan
- b. Lain – lain yang dianggap perlu



BAB 2

Perencanaan

Kinerja

2.1 Rancangan Indikator Dan Target Kinerja

2.2 Rencana Kerja Tahunan

2.3 Perjanjian Kinerja

2.4 Pengukuran Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rancangan Indikator Dan Target Kinerja

Rancangan Indikator Dan Target Kinerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan (BBRSEKP) 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat sasaran kegiatan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BBRSEKP, yang disusun dengan berpedoman kepada Rancangan Indikator Dan Target Kinerja Badan Pelatihan Dan Penyuluhan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan (BPPSMKP) 2025-2029, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045 dan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025- 2029 dan dapat ditinjau ulang sesuai aturan yang berlaku.

Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Periode 2025-2029, yang ditetapkan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” serta pencapaian sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Periode 2025-2045, sektor kelautan dan perikanan memiliki peran yang sangat besar dalam Trisula Pembangunan sebagai kerangka pikir untuk menurunkan kemiskinan ekstrem hingga 0%, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8%, serta peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

A. Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Mendukung Terwujudnya Visi - Misi Presiden dan Wakil Presiden, Yaitu: Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk **“Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan Sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. BPPSDMKP sebagai unit eselon 1 KKP mempunyai visi untuk mewujudkan SDM yang kompeten.

BBRSEKP yang merupakan unit di bawah BPPSDM mempunyai visi untuk mewujudkan SDM kompeten yang lebih spesifik sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh BBRSEKP. Tugas dan fungsi BBRSEKP adalah melaksanakan kegiatan riset sosial ekonomi

kelautan dan perikanan. Visi yang diusung oleh BBRSEKP ini tetap mendukung Visi BPPSDM dan Visi KKP. Oleh karena itu visi BBRSEKP 2020 – 2025 adalah

“Menjadi Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan dan Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi dalam Rangka Mendukung Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”



Visi tersebut mengandung kata-kata kunci yang dijabarkan sebagai **Lembaga Riset Terkemuka Penghasil Rekomendasi Kebijakan** adalah Lembaga riset yang:

1. Menciptakan iklim riset yang konsinten dan melahirkan hasil-hasil berupa rekomendasi kebijakan yang berdampak pada pengigkatan mutu kebijakan di sector kelautan dan perikanan.
2. Menjadikan hasil-hasil riset sebagai dasar dalam penyelenggaraan kebijakan pembangunan di sektor KP.

Terkemuka adalah menjadi pelopor dan rujukan utama dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan.

Inovasi Rekayasa Sosial Ekonomi adalah menghasilkan kebaruan-kebaruan hasil riset yang dapat diimplemantasikan dengan mempertahankan keberlanjutan SDKP untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat KP.

B. Misi

Misi BRSEKP mengacu pada misi asta cita BPPSDM yang menjalankan misi asta cita Presiden dan KKP dalam bidang kelautan dan perikanan yaitu:

Asta Cita -2 yakni “memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru”

Misi BBRSEKP merupakan upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan asta cita pada ekonomi biru, meliputi:

1. Menyediakan rekomendasi kebijakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing usaha kelautan dan perikanan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial;
2. Menyediakan rekomendasi kebijakan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan untuk mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan dan inovasi rekayasa sosial; dan

3. Menerapkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BBRSEKP.

C. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi BBRSEKP, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan rumusan kebijakan sosial ekonomi kelautan dan perikanan sebagai landasan kebijakan kelautan dan perikanan (*science based policy*);
2. Menghasilkan model sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
3. Menghasilkan penerapan model integrasi sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang mendukung peningkatan peran adopsi teknologi terhadap pembangunan sektor kelautan dan perikanan;
4. Menghasilkan *big data* sosial ekonomi kelautan dan perikanan; dan
5. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan manajerial riset dan SDM secara efektif dan efisien.

D. Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025-2029

Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program. BPPSDMKP tahun 2025 – 2029 menetapkan lima sasaran program yang mengacu pada sasaran strategis KKP, yaitu:

SP-1 Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

SP-2 Termanfaatkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan oleh Masyarakat;

SP-3 Terselenggaranya Tata Kelola yang Mendukung Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;

SP-4 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel di Lingkungan BPPSDMKP.

Sebagai unit kerja Eselon II, BBRSEKP melaksanakan kegiatan yang di *cascading* dari sasaran strategis (SP) BPPSDMKP menjadi sasaran kegiatan (SK) BBRSEKP yaitu **SP-2** dan **SP-4** diturunkan menjadi SK -1 dan SK-2 sebagai sasaran kegiatan yang harus dicapai yaitu:

SK-1 Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan;

SK-3 Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Gambar 5. Keterkaitan Visi, Misi dan Tujuan dalam Rancangan Indikator Dan Target Kinerja 2025-2029



Sasaran Kegiatan BBRSEKP 2025

Berdasarkan uraian sebelumnya peta strategis kegiatan riset sosial ekonomi kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh BBRSEKP pada Tahun 2025 seperti pada Gambar dibawah ini :



Gambar 4. Peta Strategis Kegiatan BBRSEKP 2026

Metode pengukuran capaian sasaran kegiatan tersebut dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (IK) atau *Key Performance Indicator*, disingkat KPI pada masing - masing sasaran. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan

Perikanan, yaitupada <http://Kinerjaku.kkp.go.id> dengan pengukuran 2 strategis kegiatan sebagai berikut :

a) Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan ke satu (SK- 1) yang akan dicapai adalah **“Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan”** dengan Indikator Kinerja :

1. Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi) pada tahun 2026 sebanyak 2 paket.

b) Sasaran Kegiatan 2

Sasaran Kegiatan ke dua (SK-2) yang akan dicapai adalah **“Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan”** dengan Indikator Kinerja:

1. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada tahun 2026 sebesar 86%;
2. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) pada tahun 2026 senilai 80;
3. Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 85;
4. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 92,10;
5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 71,75;
6. Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 82;
7. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) pada tahun 2026 sebesar 77%;
8. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai) pada tahun 2026 senilai 71.

2.2 Rencana Kerja Tahunan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan sasaran strategis, maka Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2. Rencana Kerja BBRSEKP Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Anggaran (Rp.000) Awal	Anggaran (Rp.000) Revisi
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	200.000	58.050

3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	8.706.072	8.239.492
Total Anggaran Tahun 2026		8.906.072	8.280.208

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja BBRSEKP level 2 dibuat sebagai pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi yang diturunkan dari rencana kerja tahun 2026 kementerian dan program BPPSDMKP. Dokumen perjanjian kinerja memuat informasi tentang program, sasaran kegiatan, indikator kinerja dan target yang akan dicapai serta alokasi anggaran per tahun. Tahun 2026 BBRSEKP telah menetapkan rencana untuk merealisasikan 9 (sembilan) Indikator Kinerja sebagai penjabaran atas sasaran program Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dan ditandatangani oleh Kepala BPPSDMKP Bersama dengan Kepala BBRSEKP pada tanggal 5 Januari 2026.

Adapun Indikator Kinerja tahun 2026 sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3. Perjanjian Kerja BBRSEKP Tahun 2026

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	2
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86
		3	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80
		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	85
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,10
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,75
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82

		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	71

2.4 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP Tahun 2026, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IK adalah sebagai berikut:



Metode pengukuran kinerja pada BBRSEKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Pengukuran dilakukan oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja BBRSEKP berdasarkan Surat Tugas Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP Nomor: 10/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP). Keanggotaan Tim Pengelola Kinerja terdiri dari seluruh Koordinator yang bertanggung jawab terhadap pencapaian indikator kinerja dan staf dan tim sekretariat. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau melalui kegiatan monitoring dan evaluasi per triwulan yang dihadiri penanggung jawab dan Tim Pengelola Kinerja. Hasil pemantauan dan pengukuran diinput kedalam aplikasi Kinerjaku untuk selanjutnya dilakukan validasi oleh sekretariat BPPSDMKP.





BAB 3

Akuntabilitas

Kinerja

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP TW II Tahun 2026

3.2 Evaluasi Dan Analisis Kinerja

3.3 Realisasi Keuangan

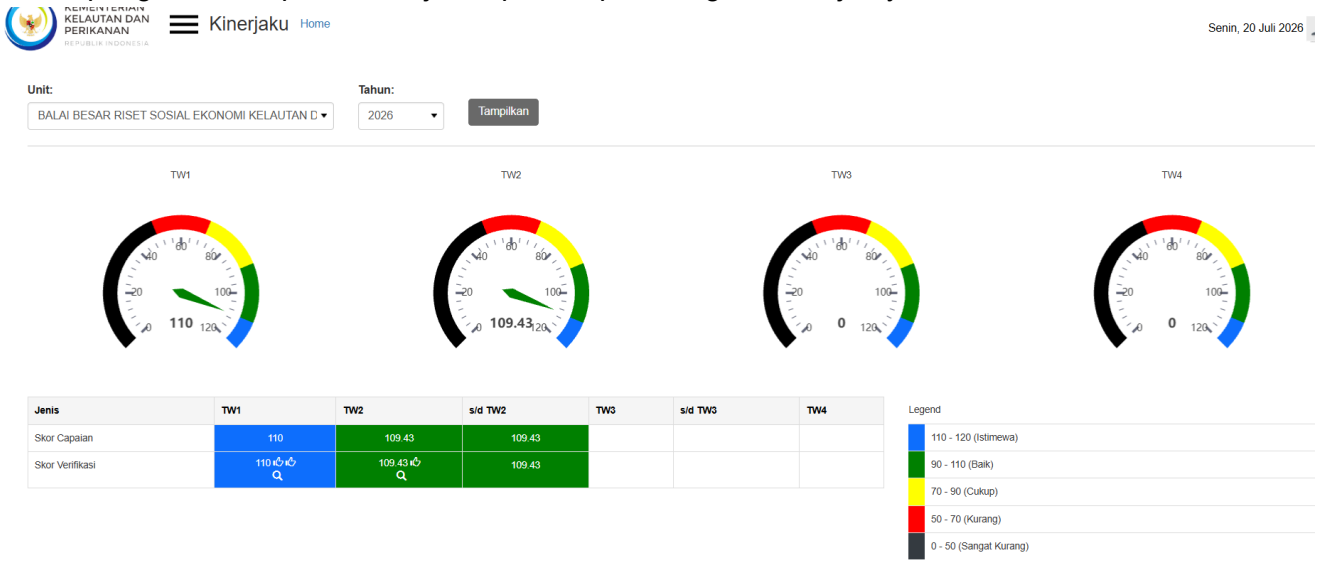
3.4 Analisis Efisiensi Anggaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja BBRSEKP TW II Tahun 2026

Pada tahun 2026, BBRSEKP telah menetapkan 9 (Sembilan) IK, dimana realisasi sampai dengan triwulan II tahun 2026 menunjukkan bahwa sasaran kegiatan telah dapat dicapai dengan rata-rata capaian sebesar **109,43% (Baik)** (Gambar 2). Uraian rincian dari hasil pengukuran capaian kinerja dilaporkan pada bagian selanjutnya bab III.



Gambar 5. Dashboard Kinerja BBRSEKP TW II Tahun 2026 sebagaimana pada aplikasi <http://Kinerjaku.kkp.go.id>

Keberhasilan pencapaian sasaran diantaranya karena faktor pengawalan monitoring dan evaluasi kegiatan pada BBRSEKP yang cukup ketat, mulai dari tahap awal hingga tahap akhir kegiatan. Terutama ketika mengalami perlambatan karena adanya perubahan transformasi struktur organisasi menjadi fungsional dan menunggu terbitnya SOTK organisasi baru belum sepenuhnya yang mana monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan sangat efektif mengawal agar kegiatan dapat tetap dilaksanakan. Upaya pemantauan menghasilkan beberapa upaya dan langkah antisipatif agar kegiatan tetap berjalan sesuai rencana dengan melakukan beberapa perubahan dan metode dalam pelaksanaan kegiatan pada BBRSEKP. Kegiatan pengelolaan kinerja dituangkan dalam Surat Tugas Kepala BBRSEKP 10/KEP-BPPSDMKP-BBRSEKP/2026 tanggal 10 Februari 2026 tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Tahun 2026.

Monitoring dan evaluasi realisasi capaian PK online juga dilakukan melalui aplikasi yang difasilitasi oleh kementerian Kelautan dan Perikanan melalui website <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Pengisian aplikasi kinerjaku oleh BBRSEKP setelah pelaksanaan pemantauan rutin terhadap perkembangan capaian melalui kegiatan monev rencana aksi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan monev dilakukan untuk memastikan tercapainya target IK yang tercantum di dalam PK dan target kegiatan per komponen. Metode yang dilakukan adalah dengan memantau capaian kinerja setiap bulan ataupun triwulan beserta kendala yang dihadapi Pemantauan secara periodik dilakukan sebagai Langkah antisipatif dan preventif terhadap indikator yang memiliki risiko tinggi untuk dicapai atau mungkin tidak dapat mencapai target.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan dengan membandingkan antara target dengan capaiannya. Evaluasi dan analisis kinerja juga dilakukan untuk melihat sejauh mana target kinerja tahun berjalan dapat direalisasikan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan realisasi terhadap target kinerja. Analisis capaian kinerja diukur untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan, membandingkan kinerja triwulan II tahun 2026 dengan kinerja triwulan I tahun 2025. Analisis dan evaluasi capaian kinerja BBRSEKP tahun 2026 menurut penetapan dua sasaran kegiatan. Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan BBRSEKP yang disusun pada bulan Januari 2026 saat ini memiliki 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu SK.01. Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, dan SK.02. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan, serta Satker memiliki 9 (sembilan) Indikator Kinerja.

Selain itu, analisis capaian kinerja juga menganalisis akar permasalahan yang menyebabkan kinerja menurun, efisiensi penggunaan sumber daya serta analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau berkontribusi terhadap penurunan kinerja BBRSEKP pada triwulan I tahun 2026. Hasil analisis capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran kegiatan sebagaimana pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Capaian Kerja BBRSEKP TW II Tahun 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Capaian TW II Tahun 2026	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86	86	100%
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80	87,58	109,48

		4	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,10	99,67	108,22
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77	100	120%
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja 1.

Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)

IK Rekomendasi dan Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Paket) merupakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Hasil Penyuluhan Pendidikan dan Pelatihan Kelautan dan Perikanan mengacu pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dalam sektor kelautan dan perikanan yang diperkenalkan dan diterapkan melalui program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan kepada masyarakat, khususnya yang terlibat dalam industri kelautan dan perikanan.

Tujuan utama dari penyuluhan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor tersebut, memperkenalkan teknik-teknik baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Model pemberdayaan sosial ekonomi kelautan dan perikanan berupa Rekomendasi kebijakan model proses bisnis untuk pemberdayaan masyarakat pesisir untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat yang mencakup pengembangan kapasitas, pemanfaatan teknologi/digital, penguatan kelembagaan dan akses pendanaan yang ditangani kepala BPPSDMKP.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun. Adapun progress kegiatan sampai dengan TW

II adalah koordinasi internal tim pelaksana kegiatan dalam penyiapan draft dokumen kerangka acuan kegiatan, serta menunggu arahan BPPSDMKP lebih lanjut terkait dengan kegiatan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp40.716.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp19.041.000 atau sebesar 46,77% dari pagu yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengakibatkan penyesuaian terhadap jadwal dan pelaksanaan sebagian kegiatan. Adapun capaian Indikator Kinerja baru dapat diukur dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran karena merupakan indikator yang dinilai secara tahunan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi anggaran berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian indikator kinerja belum dapat dihitung pada Triwulan II.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan secara bertahap melalui penyesuaian metode dan jadwal pelaksanaan agar target tahunan tetap dapat dicapai sesuai rencana.



Ket : Konsolidasi Data Calon Lokasi Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026



Ket : Survey Calon Lokasi Program Prioritas Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Tahun 2026

Gambar 6. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 1

Capaian Kinerja Pada Sasaran Kegiatan 2

Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan

Indikator Kinerja 2.

Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) merupakan IK Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh unit kerja lingkup BPPSDMKP sampai dengan waktu pengukuran.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara triwulanan berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan dalam tahun berjalan, yaitu Triwulan I (Januari–Maret), Triwulan II (April–Juni), Triwulan III (Juli–September), dan Triwulan IV (Oktober–Desember). Hasil pengukuran triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pencapaian target kinerja hingga akhir tahun. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 5. Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)

IKU-2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)									
Realisasi Capaian				2026				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
100	75	82	85	86.00	86	100.00	1.18%	86	100.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian TW II Tahun 2026		Kenaikan Capaian TW II Tahun 2025-2026		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
120	120	100.00	100.00	100	100	0.00		100	100.00

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) pada triwulan II tahun 2026 telah mencapai target yang telah ditetapkan pada rencana aksi, dengan target 86 dan capaian 86 atau sama dengan 100%. Capaian sesuai dengan surat Nota Dinas Sekretaris Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor: nomor: 2801/BPPSDM.1/HP.510/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang penyampaian Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan II Tahun 2026 Lingkup BPPSDM KP”

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 terjadi kenaikan capaian sebesar 1.18%, jika dibandingkan dengan kinerja 5 tahunan untuk IK ini cukup stabil, jika dibandingkan dengan target kinerja kegiatan tahun 2026 capaian sudah mencapai target atau sama dengan 100%.

Jika dibandingkan dengan K/L sejenis di lingkungan BPPSDMKP seperti pada Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan (BBRP2BKP) maka capaian pada BBRSEKP sama dengan capaian BBRP2BKP, adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

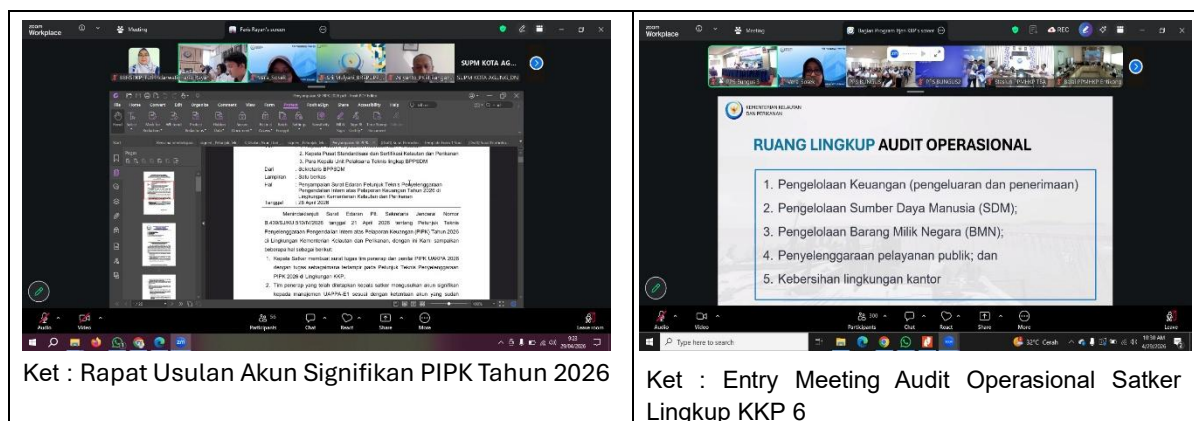
Tabel 6. Perbandingan Capaian IK 2 dengan K/L Sejenis di BPPSDMKP

Capaian IK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	86	86	100
BBRP2BKP	86	86	100

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain telah selesainya tidak ditemukannya hasil temuan pada BBRSEKP.

Kegiatan pendukung IK ini antara lain koordinasi dengan Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan Koordinator Keuangan di BPPSDMKP, serta adanya rapat dan pengawasan internal di BBRSEKP.

Kegiatan IK ini di dukung oleh anggaran BBRSEKP melalui kegiatan Manajerial “Layanan Manajemen Keuangan” Dengan adanya kebijakan efisiensi dan pemotongan anggaran, kegiatan ini terealisasi sebesar Rp4.590.000 dari pagu Rp5.100.000, sedangkan capaian output sebesar 100, kegiatan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp510.000 atau 10% dari pagu yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh target output dapat dicapai tanpa menggunakan seluruh anggaran yang tersedia.



Gambar 7. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 2

Indikator Kinerja 3.

Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)

IK Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) merupakan indikator yang dibentuk dari:

- Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya.
- Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan
- Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMAO, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RBNo.38Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IPASN dan Surat Plt Kepala BKN Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran IPASN 2023 terkait Penyesuaian Perhitungan Dimensi Kualifikasi dan Kompetensi pada IPASN.

Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 7. Penyesuaian Bobot Kualifikasi IP ASN

NO	DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
				S3	S2	S1/DIV	DIII	DI/II/DI/SMA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
1	Kualifikasi	JPT	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
		Jabatan Fungsional (Keterampilan)	SLTA	25	23	22	21	20	10
			DIII	25	23	21	20	10	5
		Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
			S2	25	20	15	10	5	1
		Jabatan Pelaksana	SLTA	25	23	22	21	20	10

Tabel 8. Penyesuaian Bobot Kompetensi IP ASN

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PENGEMBANGAN KOMPETENSI YANG DI IKUTI (BOBOT)							
		PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN		PELATIHAN FUNGSIONAL		PELATIHAN TEKNIS		SEMINAR/KONFRENSI/ SARASEHAN/WORKSHOP/ LOKAKARYA/SEJENISNYA	
		SUDAH	BELUM	SUDAH	BELUM	>= 20 JP	< 20 JP	SUDAH	BELUM
Kompetensi	JPT	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Administrator	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pengawas	15	-	-	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Fungsional	-	-	15	-	15	Proposional	10	-
	Jabatan Pelaksana	-	-	-	-	15	Proposional	17,5	-

Tabel 9. Penyesuaian Bobot Kinerja IP ASN

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

Tabel 10. Penyesuaian Bobot Disiplin IP ASN

DIMENSI	INDIKATOR	BOBOT DIMENSI MAKSIMAL	BOBOT SUB
Disiplin	Data/Informasi Riwayat Hukuman Disiplin	5	
	1 Tidak Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		5
	2 Pernah Dikenai Hukuman Disiplin		
	a. Ringan		3
	b. Sedang		2
	c. Berat		1

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara semesteran berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode semesteran dalam tahun berjalan, yaitu semester I (Januari–juni), dan semester II (Juli–Desember). Hasil pengukuran IK pada triwulan ini sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian IK Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)

IKU-3. Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)									
Realisasi Capaian				2026				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
87	81	75	86.31	80.00	87.58	109.48	1.47%	80	109.48
Persentase Capaian				Persentase Capaian TW II Tahun 2026		Penurunan Capaian TW II Tahun 2025-2026		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
120	120	108	120.00	100	109.48	8.77%		100	9.48

Capaian IK 3 Pada triwulan II Tahun 2026 telah melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu dengan target 80 dan capaian 87.58 atau sama dengan 109.48%, capaian sesuai dengan data nota dinas Sekretaris BPPSDMKP Nomor 2816/BPPSDM.1/KP.720/VII/2026 tanggal 14 Juli 2026 tentang Penyampaian Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Semester I Tahun 2026 lingkup BPPSDMKP.

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel di atas, capaian Indikator Kinerja (IK) pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai nilai 87,58. Apabila dibandingkan dengan capaian Triwulan II Tahun 2025 sebesar 86,31, terjadi peningkatan sebesar 1,47%. Sementara itu, apabila dibandingkan

berdasarkan persentase capaian terhadap target, realisasi kinerja pada Triwulan II Tahun 2026 mencapai 109,48%, lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 120,00%, sehingga terjadi penurunan persentase capaian sebesar 8,77%.

Meskipun demikian, capaian kinerja tahun berjalan tetap melampaui target yang ditetapkan sebesar 100%, dengan tingkat pencapaian sebesar 109,48%, atau 9,48% di atas target. Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja selama periode lima tahun terakhir, capaian indikator ini menunjukkan kondisi yang cukup fluktuatif. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan target dan kondisi organisasi, khususnya adanya perpindahan sejumlah pegawai ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta ke unit Eselon I lainnya di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP), sehingga memengaruhi jumlah ASN yang menjadi dasar perhitungan indikator.

Adapun apabila dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2026 telah melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat pencapaian sebesar 109,48%, atau 9,48% di atas target jangka menengah.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis antar kementerian lain seperti Politeknik Kesehatan Jakarta II, Kementerian Kesehatan hasil benchmarking menunjukkan bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP sebesar 87,58 berada di atas capaian Poltekkes Jakarta II sebesar 84,96, dengan selisih 2,62 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat profesionalitas ASN di BBRSEKP relatif lebih tinggi dibandingkan instansi pembanding, adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 12. Perbandingan Capaian IK 3 Satker Lintas K/L Lainnya

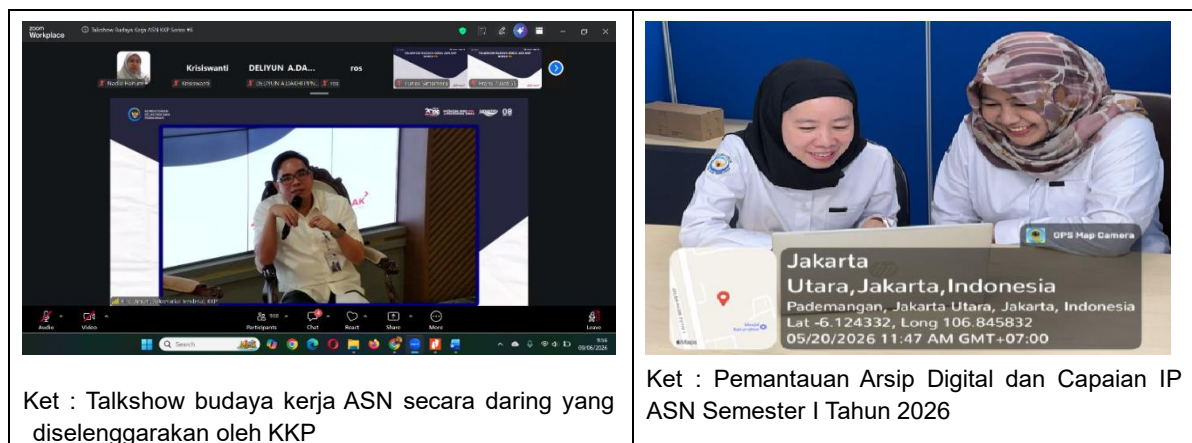
Nama Satker	Capaian Per Komponen IK IP ASN					
	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Total	Keterangan
BBRSEKP, BPPSDMKP	23.29	31.60	27.68	5	87.58	Tinggi
Poltekkes, Kemenkes	23.27	31.38	25.31	5	84.96	Tinggi

Progress kegiatan sampai dengan triwulan II antara lain:

- Penyusunan laporan kegiatan layanan manajemen SDM triwulan II tahun 2026;
- Monitoring kehadiran pegawai periode Januari-Juni 2026;
- Monitoring keikutsertaan kompetensi pegawai periode Januari-Juni 2026;
- Penyusunan laporan monitoring capaian IP ASN Semester I 2026;
- Pengisian capaian IKI pegawai periode TW II tahun 2026.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan Manajemen SDM. Sehubungan dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, realisasi anggaran kegiatan mencapai Rp1.160.000 dari pagu sebesar Rp4.670.000, atau sebesar 24,84% dari pagu yang dialokasikan. Sementara itu, capaian output kegiatan mencapai 109,48%, sehingga berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian output diperoleh tingkat efisiensi sebesar 77,31%. Secara nominal, kegiatan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp3.510.000.

Tingginya tingkat efisiensi tersebut dipengaruhi oleh adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang mengakibatkan pelaksanaan program pengembangan kompetensi mengalami penyesuaian. Meskipun beberapa kegiatan pelatihan berbayar belum dapat dilaksanakan sesuai rencana, BBRSEKP tetap berupaya memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi ASN melalui optimalisasi pelatihan nonberbayar, pemanfaatan pembelajaran daring, serta partisipasi dalam kegiatan pengembangan kompetensi yang diselenggarakan oleh kementerian, lembaga, maupun instansi pemerintah lainnya. Upaya tersebut mencerminkan komitmen organisasi untuk menjaga keberlangsungan pengembangan kompetensi ASN di tengah keterbatasan sumber daya, sehingga target kinerja tetap dapat dicapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.



Gambar 8. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 3

Indikator Kinerja 4.

Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai) merupakan kegiatan yang terdiri dari:

- Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan

penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

- Keterbukaan informasi suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan
- Manfaat keterbukaan informasi publik antara lain meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta mengurangi praktik korupsi. Implementasi keterbukaan informasi

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan II antara lain:

- Penyusunan laporan triwulan kegiatan hubungan masyarakat dan informasi triwulan II tahun 2026;
- Upload konten pada media sosial BBRSEKP periode April-Juni tahun 2026;
- Rapat terkait persiapan dokumen penilaian keterbukaan informasi.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan Hubungan Masyarakat, Informasi, dan Pelayanan Data dan Informasi Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan pagu anggaran sebesar Rp4.478.000. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp2.650.000 atau sebesar 59,18% dari pagu yang dialokasikan. Realisasi anggaran tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran pemerintah serta penyesuaian alokasi anggaran sesuai kebijakan Kementerian Keuangan, sehingga pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap sesuai prioritas. Adapun capaian Indikator Kinerja baru dapat diukur dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran karena merupakan indikator yang dinilai secara tahunan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi anggaran berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian indikator kinerja belum dapat dihitung pada Triwulan II.

Meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan tetap dilaksanakan secara bertahap melalui penyesuaian metode dan jadwal pelaksanaan agar target tahunan tetap dapat dicapai sesuai rencana.



Gambar 9. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 4

Indikator Kinerja 5.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IK Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) merupakan IK Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan/atau pengelola fiskal untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara semesteran berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode semesteran dalam tahun berjalan, yaitu semester I (Januari–juni), dan semester II (Juli–Desember). Hasil pengukuran IK pada triwulan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian IK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

IKU-5. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)									
Realisasi Capaian				2026				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
92	95.99	97.71	98.98	92.10	99.67	108.22	8.22%	92	108.22
Persentase Capaian				Persentase Capaian TW II Tahun 2026		Kenaikan Capaian TW II Tahun 2025-2026		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
120	117.06	119.16	117.83	100	108.22	8.16%	100	100	8.22

Capaian IK 5 Pada triwulan II Tahun 2026 sebesar 99.67 atau 108.22% dari target 92.10. Capaian ini sesuai dengan Nota Dinas Sekretariat Jenderal KKP- Biro Keuangan dan BMN Nomor: 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026 tanggal 13 Juli 2026 tentang Penyampaian Capaian Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2026.

Jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2025 untuk IK ini terjadi kenaikan capaian sebesar 8.22%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan persentase capaian pada kualitas pelaksanaan anggaran dari 97.44 di tahun 2025 menjadi 99.59 di tahun 2026, jika dibandingkan dengan capaian kinerja 5 tahunan, untuk IK ini cukup stabil sedangkan perbandingan capaian kinerja terhadap target Rencana Indikator Kegiatan 2025-2029 sebesar 108,22%. Secara umum, kinerja masih perlu ditingkatkan terutama pada indikator deviasi halaman kualitas anggaran terkait dengan pengelolaan UP dan TUP.

Jika dibandingkan dengan satker sejenis antar satker sejenis di BPPSDMKP seperti Balai Besar Pengolahan Produk Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan (BBRPPBKP), maka capaian pada BBRSEKP lebih tinggi dari BBRPPBKP, hal ini dikarenakan pengelolaan UP dan TUP BBRSEKP lebih baik dari BBRPPBKP, adapun rincian capaian perkomponen sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 14. Perbandingan Capaian IK 5 Satker Lintas Satker BPPSDMKP

Nama Satker	Capaian Per Komponen IK IP ASN				
	Kualitas Perencanaa (25)	Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	Nilai IKPA	Keterangan
BBRSEKP	100	99.59	100	99.67	Tinggi
BBRPPBKP	93.99	99.91	100	98.16	Tinggi

Sumber : Nota Dinas Setjend KP Nomor. 1873/SJ.2/TU.210/VII/2026

Keberhasilan atas pencapaian IK ini ditunjang oleh pemahaman yang cukup baik dari BBRSEKP terhadap komponen dan indikator penilaian IKPA serta adanya disiplin dalam pelaksanaan anggaran di BBRSEKP.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan II antara lain:

1. Permintaan Dokumen Pemeriksaan Atas LKPP TA 2025;
2. Pengumuman rencana Pengadaan Barang dan jasa pada Aplikasi SiRUP TA 2026;
3. Permintaan data Update Rekening (saldo dan Rekening Koran) Permintaan Pemanfaatan Data Aset;
4. Laporan Keuangan SAI-UAKPA T.A 2025;
5. Dokumen pengajuan Uang Persediaan (UP) BBRSEKP T.A 2026;

6. Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Revolving Uang Persediaan (GUP) dari Bulan Januari sampai Juni 2026;
7. Laporan Realisasi Anggaran Bulan April-Juni 2026;
8. Penatausahaan dokumen pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) bulan April – Juni 2026;
9. Laporan saldo Rekening Bank yang dikelola Bendahara Pengeluaran s/d Juni 2026.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan Perkantoran. Realisasi anggaran kegiatan mencapai Rp4.463.581.484 dari pagu sebesar Rp8.195.096.000, atau sebesar 54,47% dari pagu yang dialokasikan. Sementara itu, capaian output kegiatan mencapai 108,22%, sehingga berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian output diperoleh tingkat efisiensi sebesar 49,67%. Secara nominal, kegiatan menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp3.731.514.516. Hal ini menunjukkan bahwa target output tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dari pagu yang tersedia.

Realisasi anggaran pada Triwulan II masih menyesuaikan tahapan pelaksanaan kegiatan dan jadwal penyerapan anggaran, sehingga sebagian anggaran direncanakan akan direalisasikan pada triwulan berikutnya tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Bimtek Pelaporan Capaian Output Tahun 2026, Refreshment RPD Halaman III DIPA, dan Perencanaan Kas Ket : Bimtek Pelaporan Capaian Output Tahun 2026, Refreshment RPD Halaman III DIPA dan Perencanaan Kas	Ket : Sosialisasi pelaporan capaian output TA 2026
---	---

Gambar 10. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 5

Indikator Kinerja 6.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)

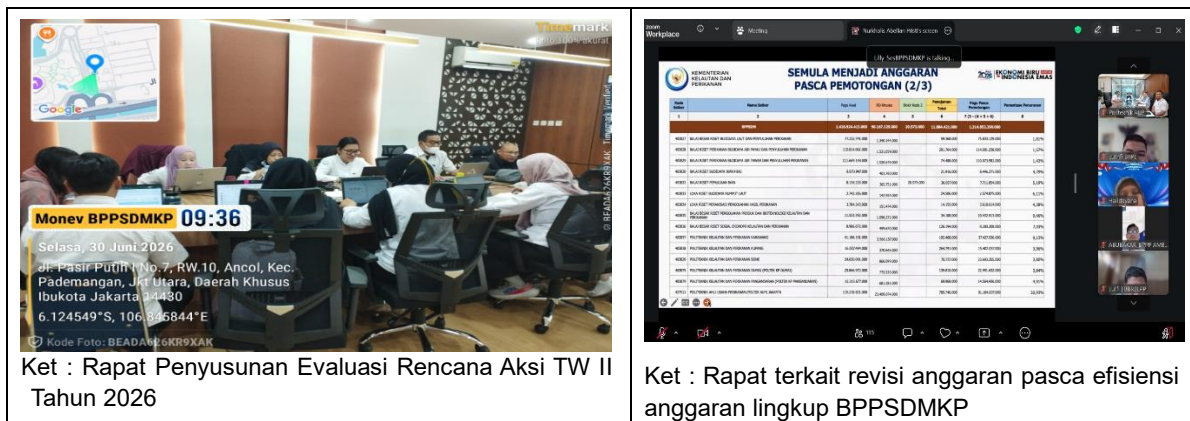
IK adalah nilai yang dihasilkan atas Kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan II antara lain:

- Penyusunan Laporan Triwulan II Tahun 2026 Layanan Monitoring dan Evaluasi;
- Pengisian capaian output pada aplikasi OMSPAN periode April–Juni Tahun 2026;
- Penyusunan dokumen kertas kerja progres Rincian Output (RO) periode April–Juni Tahun 2026;
- Melakukan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran melalui revisi anggaran terkait Rencana Penarikan Dana (RPD) agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
- Pelaksanaan rapat pembahasan rencana kegiatan Tahun 2026; dan
- Input realisasi pelaksanaan kegiatan pada aplikasi OMSPAN.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan. Realisasi anggaran kegiatan mencapai Rp6.506.300 dari pagu sebesar Rp11.135.000, atau sebesar 58,43% dari pagu yang dialokasikan. Adapun capaian output kegiatan baru akan diukur dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran karena indikator ini merupakan indikator tahunan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi anggaran berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan capaian output belum dapat dihitung pada Triwulan II.



Gambar 11. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 6

Indikator Kinerja 7.

Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)

IK Penilaian Mandiri SAKUP BBRSEKP indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

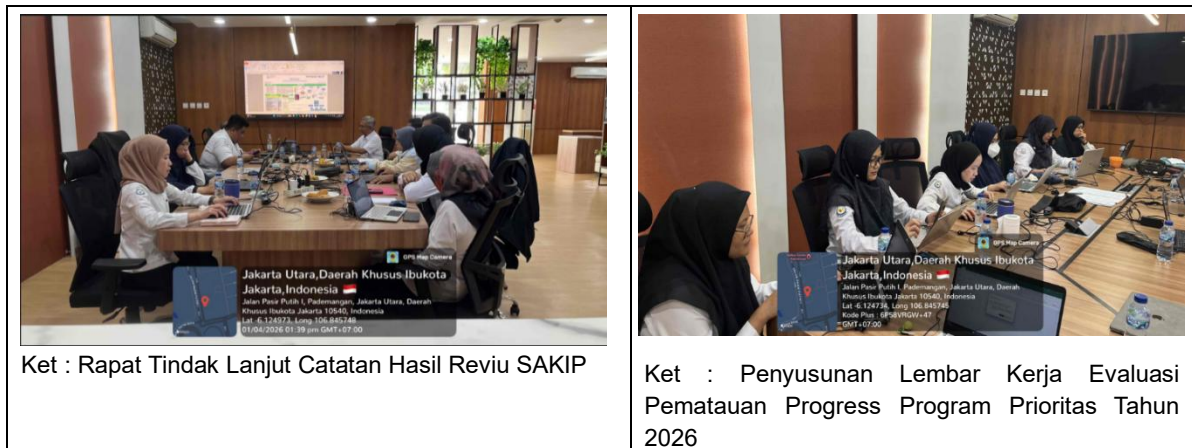
Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan II antara lain:

- Penilaian Mandiri SAKIP oleh Tim Penilaian Sekretariat BPPSDMKP;
- Tindak Lanjut catatan Hasil Reviu PM SAKIP
- Rapat persiapan pengukuran kinerja triwulan II tahun 2026;
- Pengisian indikator dan capaian kinerja pada aplikasi kinerjajaku;
- Verifikasi dan validasi capaian kinerja triwulan II tahun 2026;
- Penyusunan evaluasi rencana aksi triwulan II tahun 2026;
- Penyusunan laporan kinerja triwulan II tahun 2026.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, belum terdapat realisasi anggaran pada kegiatan tersebut dari pagu yang dialokasikan sebesar Rp680.000, sehingga persentase realisasi anggaran masih sebesar 0,00%. Adapun capaian output kegiatan baru dapat diukur dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran karena indikator ini merupakan indikator yang diukur secara tahunan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi anggaran berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian output belum dapat dihitung pada Triwulan II.

Belum adanya realisasi anggaran pada Triwulan II disebabkan pelaksanaan kegiatan dijadwalkan pada Semester II sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana.



Gambar 12. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 7

Indikator Kinerja 8.

Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)

IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) merupakan instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara triwulanan berdasarkan capaian kinerja pada masing-masing periode triwulan dalam tahun berjalan, yaitu Triwulan I (Januari–Maret), Triwulan II (April–Juni), Triwulan III (Juli–September), dan Triwulan IV (Oktober–Desember). Hasil pengukuran triwulanan tersebut menjadi dasar evaluasi dan pengendalian pencapaian

target kinerja hingga akhir tahun. Adapun rincian capaian IK sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian IK Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)

IKU-8. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)									
Realisasi Capaian				2026				Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
2022	2023	2024	2025	Target TW II 2026	Realisasi TW II Tahun 2026	% Capaian	% Kenaikan TW II Tahun 2025-2026	Target 2026	% Capaian thd target 2026
-	-	-	100	77.00	100	120.00	0.00%	77	120.00
Persentase Capaian				Persentase Capaian TW I Tahun 2026		Kenaikan Capaian TW II Tahun 2025-2026		Rencana Indikator Kegiatan BBRSEKP 2025 – 2029	
-	-	-	120.00	100	100	0.00		100	100.00

Capaian IK pada triwulan II tahun 2026 sudah mencapai target yang telah ditetapkan bahkan lebih dimana dengan target 77 dan capaian sebesar 100 atau sama dengan 120%, Capaian sesuai dengan nota dinas Sekretaris BPPSDMKP nomor: B.4633/BPPSDM.1/PL.410/VII/2025 tanggal 15 Juli 2026 tentang Capaian Indikator Kinerja persentase Rencana Umum Pengadaan di lingkungan BPPSDM yang diumumkan pada SIRUP Triwulan II TA. 2026.

Indikator ini, jika dibandingkan dengan triwulan II tahun sebelumnya maka capaian IK tidak terjadi peningkatan ataupun penurunan capaian kinerja.

Jika dibandingkan dengan satker K/L sejenis seperti BBRP2BKP, sebagaimana pada tabel berikut:

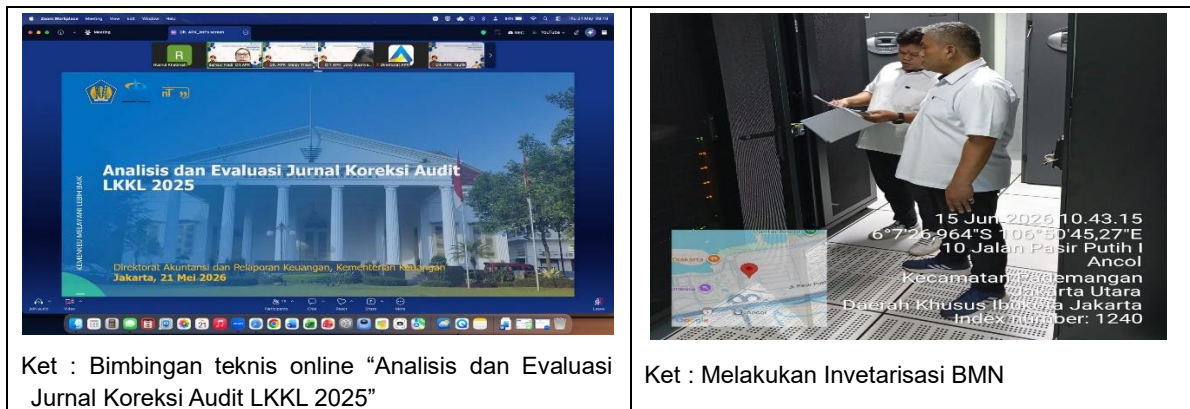
Tabel 16. Perbandingan Capaian IK 8 K/L BBRSEKP Dengan BBRP2BKP

Capaian Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)			
Satker	Target	Realisasi	Persentase
BBRSEKP	77	100	120
BBRP2BKP	77	100	120

Keberhasilan atas pencapaian IK ini antara lain terselesaikannya identifikasi efisiensi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja (format excel) sebagai data dukung klarifikasi penyesuaian Pagu Pengadaan pasca efisiensi yang telah disampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta tersusunnya revisi RUP pada SIRUP berdasarkan kertas kerja klarifikasi.

Kegiatan pendukung keberhasilan IK ini antara lain koordinasi dengan Set. BPPSDMKP, adanya rapat dan koordinasi dengan tim sekretariat BPPSDMKP.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan BMN dan Layanan Umum. Realisasi anggaran kegiatan mencapai Rp1.697.000 dari pagu sebesar Rp17.993.000, atau sebesar 9,43% dari pagu yang dialokasikan. Sementara itu, capaian output kegiatan mencapai 120,00%, sehingga berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian output diperoleh tingkat efisiensi sebesar 92,14%. Tingginya tingkat efisiensi tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan yang mengutamakan optimalisasi sumber daya yang tersedia serta adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, sehingga target output tetap dapat dicapai bahkan melampaui target dengan penggunaan anggaran yang relatif rendah.



Gambar 13. Dokumentasi Kegiatan Pendukung IK 8

Indikator Kinerja 9.

Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)

IK Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai) merupakan Arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha penyelamatan secara terpadu, sistemik, dan komprehensif dengan mengukur tingkat pencipta arsip dalam menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundang-undangan. Nilai pengawasan kearsipan internal adalah penilaian yang dilakukan untuk menilai seberapa baik pencipta arsip dalam menjalankan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Audit kearsipan internal dilakukan oleh tim pengawas kearsipan internal untuk menilai pengelolaan arsip dinamis di lingkungan pencipta arsip yang memuat kondisi faktual, pemenuhan standar, rekomendasi, dan nilai pengawasan. Dasar hukum pengawasan kearsipan KKP adalah Peraturan Menteri Kelautan

dan Perikanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai pengawasan kearsipan internal unit eselon I diperoleh dari nilai unit kearsipan II.

Indikator Kinerja Utama ini diukur secara tahunan berdasarkan capaian kinerja pada periode tahun berjalan. Hasil pengukuran IK pada triwulan ini belum dapat diukur, karena capaian IK baru dapat diukur di akhir tahun.

Progress kegiatan sampai dengan triwulan II antara lain:

- Penyusunan laporan triwulan II tahun 2026 layanan kearsipan
- Mengikuti zoom meeting terkait pembahasan kearsipan dengan ANRI;
- Kompilasi dokumen untuk yang status pemusnahan arsip di BBRSEKP;
- Berkoordinasi dengan set BBPSDMKP terkait layanan kearsipan.
- Penyiapan dokumen arsip dalam penilaian kearsipan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian Indikator Kinerja (IK) ini didukung melalui kegiatan Manajerial Layanan Penyelenggaraan Kearsipan. Realisasi anggaran kegiatan mencapai Rp0 dari pagu sebesar Rp340.000, atau sebesar 0,00% dari pagu yang dialokasikan. Adapun capaian Indikator Kinerja baru dapat diukur dan ditetapkan pada akhir tahun anggaran karena indikator ini merupakan indikator yang dinilai secara tahunan. Oleh karena itu, tingkat efisiensi anggaran berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian indikator kinerja belum dapat dihitung pada Triwulan II.

3.3 Realisasi Keuangan BBRSEKP TW II Tahun 2026

Penyerapan Pencapaian kinerja akuntabilitas keuangan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan secara umum berhasil mencapai sasaran kegiatan yang ditetapkan dengan baik. Anggaran BBRSEKP pada triwulan II tahun 2026 disusun berdasarkan variable jenis pengeluaran dan variable kegiatan. Variabel pengeluaran yaitu belanja pegawai dan belanja barang. Sedangkan variable kegiatan adalah kegiatan dukungan manajemen.

Pagu anggaran BBRSEKP dalam DIPA TA. 2026 adalah Rp 8.280.208.000 yang terdiri dari (1) Belanja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp8.195.096.000 dan Belanja Barang dengan pagu anggaran sebesar Rp1.251.444.000 dengan realisasi anggaran pada triwulan II tahun 2026 sebesar Rp4.499.905.784 atau sama dengan 54,35%.

Tabel 17. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran Perjenis Belanja TW II Tahun 2026

JENIS BELAJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
Belanja Pegawai	8.195.096.000	3.884.869.503	55,27%
Belanja Barang	1.251.444.000	615.036.281	19,25%
TOTAL	8.280.208.000	4.499.905.784	54,35%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 18. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	40.716.000	19.041.000	46,77%
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	8.239.492.000	4.480.864.784	54,38%

Sumber : Aplikasi Omspan

Tabel 19. Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran per IK TW II Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomen dasi)	40.716.000	19.041.000	46,77
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	5.100.000	4.590.000	90,00
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	4.670.000	1.160.000	28,84
		4 Penilaian Keterbukaan	4.478.000	2.650.000	59,18

			Informasi BBRSEKP (Nilai)			
		5	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	8.195.096.000	4.463.581.484	54,87
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	11.135.000	6.506.300	54,43
		7	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	680.000	0	0,00
		8	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	17.993.000	1.697.000	9.43
		9	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	340.000	0	0,00
Total Realisasi Anggaran TW I Tahun 2026				8.280.208.000	4.499.905.784	54,35

Sumber : Aplikasi Omspan

3.4 Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya BBRSEKP

A. Efisiensi Anggaran

BBRSEKP sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran. Berdasarkan Diktum 14 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran mengamanatkan pelaksanaan assessment RO, yaitu: *“Dalam rangka meningkatkan kualitas data capaian kinerja yang dilaporkan melalui sistem informasi, dilakukan pengisian informasi pra-pelaporan”*

Efisiensi terdiri atas efisiensi keluaran (output) Program untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat unit Eselon I/program dan efisiensi keluaran (output) kegiatan untuk evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan. Dalam rangka penghitungan efisiensi data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran program dan efisiensi keluaran output kegiatan meliputi: data capaian keluaran program, data capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran dan realisasi anggaran. Efisiensi dihitung dengan cara membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya.

Efisiensi merupakan salah satu aspek yang menggambarkan tingkat optimalisasi penggunaan sumber daya dalam mendukung pencapaian target kinerja. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan persentase realisasi anggaran terhadap persentase capaian kinerja, sehingga dapat menggambarkan sejauh mana penggunaan anggaran mampu menghasilkan output atau kinerja yang ditetapkan.

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, BBRSEKP memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.280.208.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp4.499.905.784 atau 54,35% dari pagu yang dialokasikan. Sementara itu, capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 109,43%. Berdasarkan perbandingan antara persentase realisasi anggaran dan persentase capaian kinerja tersebut, diperoleh tingkat efisiensi sebesar 50,33%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi telah melampaui target yang ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang masih berada di bawah pagu yang tersedia.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator kinerja yang bersifat tahunan sehingga capaian output maupun efisiensinya baru dapat diukur dan dihitung pada akhir tahun anggaran. Oleh karena itu, tingkat efisiensi pada beberapa indikator tersebut belum dapat disajikan pada Triwulan II dan akan dihitung setelah seluruh target kinerja tahunan tercapai.





BAB 4

Penutup

4.1 Kesimpulan

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

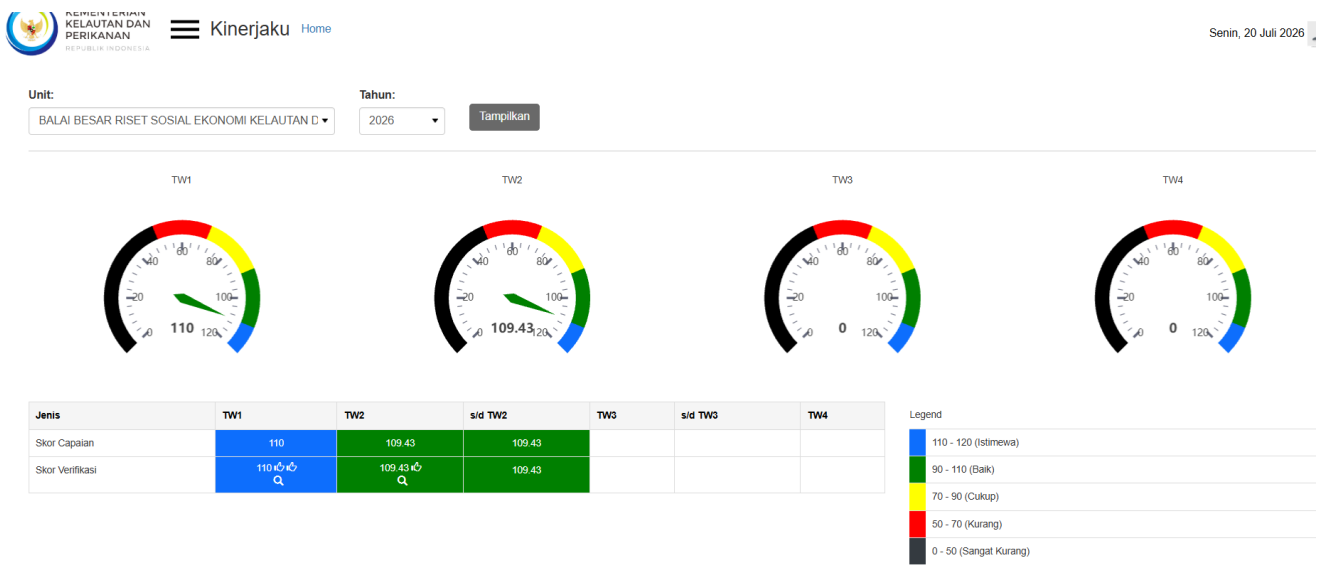
BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja BBRSEKP pada triwulan II tahun 2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing – masing Sasaran Kegiatan (SK). Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balance scorecard* dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu pada <http://Kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BBRSEKP di tingkat satker pada triwulan II tahun 2026 sebesar **109,43%**, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:

Gambar 14 . Capaian Kinerja pada Dashboard Kinerjaku BBRSEKP TW II Tahun 2026



Selama triwulan II tahun 2026 dari 9 IK BBRSEKP, terdapat 1 IK berstatus istimewa (biru) dan 3 IK berstatus baik (hijau) serta 5 IK baru akan diukur pada triwulan berikutnya. Rincian target dan realisasi 4IK tersebut adalah:

- Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%) dengan target sebesar 86% dan capaian sebesar 86% atau sama dengan 100%;
- Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks) dengan target 80 dan capaian sebesar 87,58 atau sama dengan nilai indeks IP ASN sebesar 109,48%;
- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai) dengan target senilai 92,10 dan capaian senilai 99,67 atau sama dengan 108,22%

8. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%) dengan target sebesar 77% dan capaian sebesar 100% atau sama dengan 120%;

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja BBRSEKP Triwulan II Tahun. 2026

N o	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target TW II Tahun 2026	Capaian TW II Tahun 2026	% Capaian
1	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1 Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan(Rekomendasi)	-	-	-
2	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86	86	100%
		3 Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80	87,58	109,48
		4 Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		5 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,10	99,67	108,22
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		7 Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	-	-	-
		8 Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77	100	120%
		9 Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	-	-	-

4.2 Permasalahan Dan Rekomendasi

Secara umum, pencapaian kinerja BBRSEKP adalah Baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja, yang dapat tercapai sesuai dengan target kinerja pada triwulan II tahun 2026, bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Dari sisi akuntabilitas keuangan, realisasi anggaran BBRSEKP selama tahun 2025 sebesar Rp4.499.905.784,- relatif rendah dari pagu anggaran Rp8.280.208.000 Dengan demikian, pencapaian kinerja output BBRSEKP dapat tercapai dengan dukungan anggaran sebesar 54,35% dari pagu.

Jika dilihat berdasarkan Sasaran Kegiatan (SK), maka dari dua SK tercapai melebihi target atau **“BAIK”**, yaitu dari SK “Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam

penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan” dengan persentase capaian 109,43%.

Guna mewujudkan peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Dalam rangka mendorong peningkatan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BBRSEKP secara berkala perlu dilakukan melalui penguatan pengendalian kinerja dan optimalisasi pelaksanaan rencana aksi pada triwulan berikutnya.

2. Verifikasi Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik, kegiatan pemantauan atas capaian IK secara berkala perlu dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan sesuai dengan rincian target IK yang disusun serta untuk melihat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian IK melalui evaluasi rencana aksi secara berkala.

Capaian kinerja diharapkan lebih baik dari triwulan tahun sebelumnya, atau target berikutnya lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepatuhan dalam menyampaikan data dukung juga perlu ditingkatkan melalui mekanisme penyampaian data capaian sekaligus dilengkapi dengan bukti data dukung capaian.

Akhirnya, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh pegawai maupun stakeholders BBRSEKP. Akhirnya, BBRSEKP berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAR www.kkp.go.id SUREL bppsdm@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Novi Susetyo Adi**
Jabatan : Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial
Ekonomi Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta



Ditandatangani
Secara Elektronik

Novi Susetyo Adi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	1.	Rekomendasi dan/atau Model Pemberdayaan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi)	2
2.	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan	2.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja BBRSEKP (%)	86
		3.	Indeks Profesionalitas ASN BBRSEKP (Indeks)	80
		4.	Penilaian Keterbukaan Informasi BBRSEKP (Nilai)	92
		5.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	92,1
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran BBRSEKP (Nilai)	71,75
		7.	Penilaian Mandiri SAKIP BBRSEKP (Nilai)	82
		8.	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang Diumumkan pada SIRUP BBRSEKP (%)	77
		9.	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal BBRSEKP (Nilai)	71

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	200.000.000
2.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	8.706.072.000
Total Anggaran Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan		8.906.072.000

Jakarta, 5 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

I Nyoman Radiarta

PIHAK PERTAMA
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi
Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Novi Susetyo Adi



Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Badan Penyuluhan Dan Pengembangan SDM Kelautan Dan Perikanan

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan

2026